



Rilis
Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025
Ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal 6 – 10 Desember 2024

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Kota Palembang – Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 – 10 Desember 2024. Kunjungan dipimpin oleh Bapak H. Abidin Fikri, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur IX, beserta beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI yang mengikuti acara kunjungan reses.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI diterima oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan beserta Kakanwil Kementerian Agama, Kadis Dinas Sosial, Kepala BPBD, Kepala PP - PA, Ketua Baznas, se-Provinsi Sumatera Selatan dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Kunjungan ke Kota Palembang – Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kebencanaan.

Rekomendasi dan saran pada kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mengusulkan penambahan kuota dan petugas haji kepada Kementerian Agama RI pada musim haji tahun 1446 H/2025 M.
2. Memastikan program bantuan sosial yang diterima oleh KPM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pemutakhiran DTKS *By Name By Address* (BNBA).
3. Mengusulkan penambahan 1 (satu) orang operator di tingkat desa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja SDM pendamping PKH agar berjalan efektif dan efisien.
4. Me-realisasi wilayah kerja Sentra Budi Perkasa di Kab. Bungo, Provinsi Jambi menjadi wilayah kerja Sentra Alyatama, Provinsi Jambi.
5. Me-revitalisasi KUA dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merubah status kepemilikan tanah menjadi milik Kementerian Agama RI.
6. Meningkatkan anggaran yang terkait dengan sarana dan prasarana logistik kebencanaan serta sosialisasi kebencanaan terutama di daerah rawan bencana, sebagai upaya mitigasi bencana.
7. Menambah SDM pada UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di tingkat Kab/Kota se-Sumatera Selatan.
8. Mengalokasikan bagian dari anggaran desa yang secara khusus digunakan untuk program-program yang bertujuan menciptakan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA). Tujuan utama dari alokasi dana ini adalah untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

9. Mendesak Ditjen Pendis Kementerian Agama RI untuk mendapatkan beasiswa KIP untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) agar sama dan sebanding dengan Perguruan Tinggi Umum lainnya.
10. Pembukaan Fakultas Kedokteran UIN Raden Fatah Palembang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dibidang kesehatan dan menjawab kebutuhan masyarakat akan tenaga medis khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Namun, upaya ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang perlu diatasi khususnya proses perizinan yang panjang dan kompleks yang dapat menghambat pembukaan fakultas kedokteran. Oleh karena itu, tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mendesak agar Kampus UIN Raden Fatah Palembang melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi guna mengakselerasi perizinan yang dimaksud.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan baik kebijakan maupun anggaran kepada Pemerintah Provinsi Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kebencanaan.

Palembang, 6 Desember 2024

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI.